



**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH  
PADA KOTA DAN KABUPATEN  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diusulkan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi*

*Oleh:*

**DESY RATNA SARI  
NPM 1415100177**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DESY RATNA SARI  
NPM : 1415100177  
PROGRAM STUDI : AKTIVITANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP  
BRLANTA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN DI  
SUMATERA UTARA

MEDAN, JANUARI 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(UTINAWAN SE, M.Si)



DEKAN

(DESY NFA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(OKTARINI KHAMILAH SRG, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(FITRIYANI PANGUABEAN, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DIBETUKAN OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : DESY RATNA SARI  
NPM : 1415160177  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA-SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP  
BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN DI  
SUMATERA UTARA

MEDAN, OKTOBER 2019

KEPTA

(JUNAWAN SE, M.Si)



ANGGOTA - I

(OKTARNI KHAMILAH SRD, S.E., M.Si)

ANGGOTA - II

(FITRI VANI PANGLABEAN SE, M.Si)

ANGGOTA - III

(RAHMA BR PURBA SE, M.Si., AK. CA)

ANGGOTA - IV

(HERNAKATY SE, MM)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DESY RATNASARI  
NPM : 1415100177  
Fakultas/program studi: SOSIAL SAINS : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP  
PREDIKSI BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN  
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Ekklusif kepada UNPAD untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019



METERAI  
TEMPEL  
6000

(Desy Ratna Sari)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desy Ratna Sari  
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 30 Mei 1993  
NPM : 1415100177  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Komplek Setia Budi Point B 14

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana Insyaf pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sekenanya, untuk dapat dipergunakan seperthnya.

Medan, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



(Desy Ratna Sari)

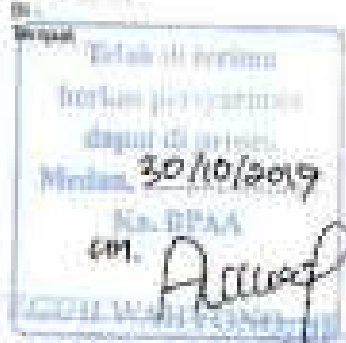
Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme 59,9% *JK*



No BMA-2019-041

Kel | Persewaan Meja Kerja

Akhir, 28 Oktober 2019  
 Kampus 1 C - Jagati/Obi Dekan  
 Fakultas SCSH, SaHS  
 UNPAS Asoen



Demikian surat saya yang bertanda tangan ini :  
 Nama : DEDY PUTRA SARI  
 Tempat/Tgl. Lahir : KARAGAL KAMAR / 01 MEI 1990  
 Nama Orang Tua : HARUNNABD YASID  
 N. T. N : 141500017  
 Fakultas : SCSH, SAKS  
 Program Studi : SaHS  
 No. HP : 081 90782811  
 Alamat : RUMAH DI SERTA SUDH PONTI B 14

Sebagai bentuk kepedulian Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Kerja (Meja dengan judul, Analisis Pengaruh Dana Akademi Utama (DAU) dan Peningkatan Adu Daerah (PAD) terhadap Kredit Belajar Diambil pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, Sebangunnya saya susunlah :

1. Melampirkan RMA yang telah diaman oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menyetor ulang portofolio nilai mata kuliah yang perlu dikoreksi (PK) dan revalidasi (R) kecuali setelah lulus ujian meja kerja.
3. Tidak tercapai ketuntasan belajar pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas plagiarisme
5. Terlampir pas photo untuk bahan ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar (tanpa frame)
6. Terlampir foto copy STTB NTA dipaparkan 1 (satu) lembar dan juga mahasiswa yang lampiran (1) ke (5) meliputi pasphoto dan transkrip semester 1 lembar
7. Terlampir pekeraman bujukan pendaftaran yang sudah bertanda dan terada sebanyak 1 lembar
8. Demos valid di atas 2 exemplar (1 untuk pendaftaran, 1 untuk revalidasi) dan 104 lembar (untuk 5 exemplar untuk pengisi) (berada dan validasi pengisian dan bujukan revalidasi semester keikutsertaan yang berlaku) dan lembar penuntasan setelah di tandatangan dosen pembimbing, print dan jelas
9. Soft Copy lampir disimpan di CD sebanyak 2 file. Sesuai dengan judul lampiran
10. Terlampir surat keterangan BKKM (jika saat pengambilan surat)
11. Setelah menyelesaikan pernyataan point-point diatas, mohon untuk melampirkan surat
12. Bersedia melampirkan biaya biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pelaksanaan ujian tersebut, dengan pertanda di :

1. [100] Ujian meja kerja	Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Menda	Rp.	1.500.000
3. [300] Bebas Pustaka	Rp.	100.000
4. [111] Bebas Lab	Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.250.000</b>
<b>c. Uang kuliah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.500.000</b>
		<b>4.750.000</b>

*M* 30/10/19  
*M* 10/19

Ukuran Toga : **M**



Hasil Pengisian  
 DEDY PUTRA SARI  
 1415100177

1. Surat permohonan ke fak (dan berfoto diri) :
  - a. Telah di cap Adui Penanganan dan DPT Persewaan UNPAS Medan.
  - b. Menunjukkan Bukti Persewaan Uang Kuliah di LP semester berjalan
2. Biaya Kumpul 2 (dua) untuk : Pustaka - untuk BMA (sisi) - 100.000.



# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

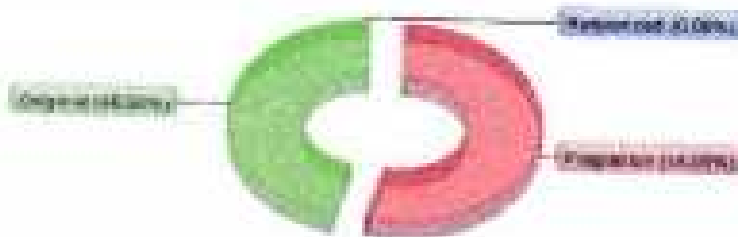
Analyzed document: 16/10/2019 13:22:23

## DESY RATNA SARI\_1415100177\_Akuntansi.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_Licensee4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Praset: Rowrite. Detected language: Indonesian

### Top sources of plagiarism:

- 1. URL: [http://www.123dok.com/indonesia/ty894my-program-penelitian-sel-dapat-dan-dana-nya...](#)
- 2. URL: [http://www.123dok.com/indonesia/ty894my-program-penelitian-sel-dapat-dan-dana-nya...](#)
- 3. URL: [http://www.123dok.com/indonesia/ty894my-program-penelitian-sel-dapat-dan-dana-nya...](#)

Other Sources:

### Processed resources details:

254 - OK / 48 - Failed

Other Sources:

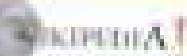
### Important notes:

Wikipedia

Google Books

Ghostwriting services

Anti-cheating



Plag Detector

[not detected]

[not detected]

[not detected]

### Excluded Urls:



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB - Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,3 Medan Fax. (061) 810077 PO. BOX - 1006 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAHAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DEVI RATNA SARI

Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Kadang / 30 Mei 1993

Alamat Rumah, Kelurahan : 1415100177

Alamat Sekolah : Akarjaya

Alamat Kantor : Akademi Sektor Publik

Alamat Email : 131 SAS. 06.2.08

Yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisa Dana Perimbangan, Dana Desa Melalui Pertimbangan Anggaran (DLPs) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja modal dan Sampoknya Pada Pemerintahan Desa/ Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>
Analisa Pengaruh Dana Alokasi Lintas DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara	<input checked="" type="checkbox"/>
Analisa Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

(Dr. Rudi Alimudin, S.T., Ph.D.)

Medan, 05 Mei 2018

Pertugas,

(DEVI RATNA SARI)

Honor : .....  
Tanggal : .....  
Dibuat oleh :

(Dr. Rizka Hani, S.T., Ph.D.)

Tanggal : 5 - 5 - 2018  
Dibuat oleh :

Oktavia Chandra Laila, Sg. Ed. Akd.

Tanggal : 05 Mei 2018  
Dibuat oleh :

(Azza Priscilla Pratiwi, S.E., A.31)

Tanggal : 5 - 5 - 2018  
Dibuat oleh :

Idris Yuni Panggabean, S.E. Akd.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Tebing (DRT) 5435571  
 website : www.panca Budi.ac.id email: unipab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Instansi : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Oktaviani Khamilah, S.S., M.Si  
 Pembimbing II : Fitri Yuni Purnamasari, S.S., M.Si  
 Mahasiswa : DEEY RATNA SARI  
 Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100177  
 Tingkat Pendidikan : Sarjana Satu (S1)  
 Judul Tesis : Analisis Persepsi Dan Sikap Umum (PUU) dan Persepsi  
 Asyik Daerah (PAD) Terhadap Praktek Belanja Jarak Jauh  
 Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara

NO	REVISI	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	2019	Portaran dan Perbaiki latar belakang masalah, waktu penelitian, Hasil Analisis dan tgg. Sejalan penelitian kuantitatif Sensus, Pembahasan dan Kesimpulan dan Peneliti ke Depan.	Of	
2	2019	Perbaiki Pembahasan, Kesimpulan dan Saran serta Abstrak, sumber teori dalam landasan teori	Of	
3	2019	Perbaiki Daftar Pustaka dan Pembahasan Add & Sibony Mega Hidayat	Of	

Medan, 22 Maret 2019  
 Disetujui/Diwatujui oleh  
 Dosen

Pembimbing I

Oktaviani Khamilah, S.S., M.Si





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gani Subroto Km. 4,5 Tap (051) 8450571  
 website : www.pancabudi.ac.id email : upabi@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

PW-SPK-0012/04

1. Nama  
 2. No  
 3. Pembimbing I  
 4. Pembimbing II  
 5. Mahasiswa  
 6. Program Studi  
 7. Pokok Mata  
 8. Pendekatan  
 9. Tugas Akhir/Thesis

Universitas Pembangunan Panca Budi  
 SOSIAL SAINS  
 Octaviani Khumalahti S.E., S.E.M.G.  
 Fitri Yanti Daryusabara, S.E., M.W.  
 DESY RATNA BARI  
 Akuntansi  
 1615100177  
 PTADA 3011  
 Analisis Pengaruh Dalam Alokasi Uang (DAU) dan Pendapat  
 Asli Daerah (PAD) Terhadap produksi Belanja Daerah Pada  
 Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara

NO	REVISI	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Cover</li> <li>- Daftar Isi</li> <li>- Bahan Pendahuluan diperluas tentang</li> <li>- Ringkasan</li> <li>- Pembahasan sebelumnya diperbaiki</li> <li>- Daftar Pustaka</li> </ul>		

Medan, 23 Maret 2019  
 Disetujui/Direvisi oleh  
 Dekan,

Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp: (081) 8455371  
 website : www.pancabudi.ac.id email : unpcb@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Nama : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Nama : **SOSIAL SAINS**  
 Nama Pembimbing I : **Oklaeni Khasmiah, S.Pd., M.Pd.**  
 Nama Pembimbing II : **Iris Yuni Panggabean, S.Pd., M.Pd.**  
 Nama Mahasiswa : **DESY RATNA BARI**  
 Nomor Program Studi : **Aruntansi**  
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1413100177**  
 Nama Mata Kuliah : **(S1)**  
 Tugas Akhir/Skripsi : **Analisis Pengaruh Dana Bantuan Umum (DBU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara**

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09 10/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cover</li> <li>- Tabel standar penulisan</li> <li>- Margin</li> <li>- Metode penulisan</li> <li>- Data mentah</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- daftar pustaka</li> </ul> <p style="text-align: center;">Ace Sidang Skripsi</p> <p style="text-align: center;">  30/09   </p>		

Medan, 22 Maret 2019  
 Disetujui/Dibaca oleh  
 Dekan,



Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km-4,5 Telp.(061) 30166000 PO.BOX.1099 Medan.

Email - [adinda@pancabudi.ac.id](mailto:adinda@pancabudi.ac.id)

<http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Oktaria Khairiah Srg.S.E., M.Si  
 Nama Mahasiswa : RIZKY FATMA SARI  
 Jurusan / Program Studi : Ekonomi / AKUNTANSI  
 No. Stambuk / NPM : 1915100177  
 Jenjang Pendidikan : Sarjana I  
 Judul Proposal : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAFTARAN  
 KULIAH MIPA TERHADAP PRESTASI BELAJAR GURU-GURU PADA KOTA  
 DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

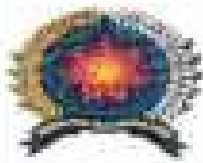
Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
31-5-18	Parabaini Identifikasi masalah dan latar belakang masalah, tabel penelitian sekiranya, Sampel dan Diagram operasional	<i>[Signature]</i>	
3-7-18	Parabaini Sampel dan latar belakang masalah dan daftar pustaka, tabel definisi operasional	<i>[Signature]</i>	
27-7-18	Parabaini latar belakang masalah dan kerangka konseptual	<i>[Signature]</i>	

ALL planar proposal

Medan,  
 Diketahui / Disetujui Oleh :  
 Dekan

*[Signature]*  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I  
*[Signature]*  
 Oktaria Khairiah Srg.S.E., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Tels (061) 8455671  
website : www.pancabudi.ac.id email : urms@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Alamat  
Kampus  
Jalan Pembangunan I  
Jalan Pembangunan II  
Tipe Mahasiswa  
Jalan/Program Studi  
Kode Pos Mahasiswa  
Jenis Pendidikan  
Bidang/Tugas Akhir/Sangat

Universitas Pembangunan Panca Budi

SOSIAL SAINS

DEWI ANI CHANDRA S.P., S.E., M.Si

FITRIYANI PANCA BUDI, S.P., M.Si

DESY NATIA SARI

Akuntansi

1410100177

SI

ANALISIS PENGETAHUAN DAN ALOKASI LINGKUNGAN (DAL) DAN PENGAPLIKASIAN  
AWI DINDAN (PAD) TERHADAP PROFESI BELAJAR GURU DAN KOTA  
DAN KONSISTENSI DI SUMATERA UTARA

TAHUN	PENGAJARAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tabel dan DAL &amp; PAD SD</li> <li>- Analisis setiap tabel (misal: digital jumbuh)</li> <li>- Indikator lingkungan atau SD</li> <li>- Refleksi diri</li> <li>- Indikator (apakah v.)</li> <li>- Bagaimana mencari indikator</li> <li>- Daftar pustaka</li> </ul>		
	<p>Ace Seminar Proposal</p>  <p>20/08 2018</p>		

Medan, 20 Juli 2018  
Dikeluarkan/Disetujui oleh  
Dekan,

  
  
 Dr. Surya Mita, S.P., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp. (061) 8455571  
 website : www.panca Budi.ac.id email : unpa@panca Budi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas  
 Fakultas  
 Jurusan Pembimbing I  
 Jurusan Pembimbing II  
 Nama Mahasiswa  
 Jurusan/Program Studi  
 Nomor Pokok Mahasiswa  
 Bidang Pendidikan  
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi  
 FAKULTAS SOSIAL SAINS  
 OKTAVIANI SHAMILAH S.Pd, S.E, M.Pd  
 INTI YANI RAHAGADIAN, S.E, M.Pd  
 DESTI RATNA DARI  
 Akuntansi  
 1415100177  
 ST  
 ANALISIS PENGARUH DANA ALYAS LUMUM (DAN) DAN PENDAPATAN  
 ASU BERSAMA (PAB) TERHADAP PRODUKSI SELANJA DAN/ATAU PADA KOTA  
 LAMPUNG UTARA DAN SUKATERA LAMARA

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/08 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- Daftar tabel</li> <li>- Daftar gambar</li> <li>- Pembahasan UU dan peraturan</li> <li>- Referensi yg dikutip 10 kali (minimal tabel 2x)</li> <li>- Pembahasan 5.000 di garis merah</li> <li>- Pembahasan contoh pd tabel</li> <li>- Minimal 10 pembicaraan setiap Bab</li> <li>- Pap, Uuday 3, dlt 2 final</li> <li>- 5 letter pembicaraan</li> <li>- Minimal 10 tabel dgn margin 4</li> <li>- tabel operasionalisasi variabel</li> <li>- pembicaraan tabel pap, dlt, dan pap</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan gambar</li> <li>- Daftar gambar, lampiran dan UU, pp dlt.</li> </ul>		

Medan, 29 Juli 2018  
 Ditandatangani oleh :  
 Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km 4,5 Telp.(061) 50 200 511 PO.BOX 1099 Medan.  
<http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA KOREKSI**

Di sini Semen Tanggal 4 - 11 - 2019 Pukul 14.04 Wita, bertempat di  
Sidang Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan telah dilaksanakan Sidang  
ini kepada :

Desy Fatma Sari

1415 100199

Studi

Akuntansi

Kejuruan

Analisis Pengaruh Daur Suku PAD terhadap Perilaku  
Belanja Daerah pada Kota Suku Kabupaten  
Sumatera Utara

Penguji - I

Okfanni Khamilah, S.p., SE, M.Si

Penguji - II

Fitri Yuni Panggabean, SE, M.Si

Setelah hasil dari Tim Meja hijau, bahwa Skripsi yang disidangkan dianggap masih perlu disempurnakan  
materi sebagai berikut :

Materi Perlubaikan

Ganti Kalimat Predikasi Belanja Daerah karena pendati  
menggunakan Data Realisasi Belanja Daerah.

Penguji II

Penguji III

Penguji IV

Penguji V





Acc Gidung Mgr  
Hjau  
3/3/19  
3

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA  
DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**DESY RATNA SARI**  
NPM 1415100177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2018**

*Ass. Sekeloa Skripsi*  
*Filiy 30/09/2019*



**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA  
DAERAH PADA KOTA DAN  
KABUPATEN DI  
SUMATERA  
UTARA**

**SKRIPSI**

Dijadikan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**DESY RATNA SARI**  
NPM 1415100177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2019**

ke Sidiang Skripsi

*F. M. Sidiang* 20/03/2019



Ace Gidney M. Sidiang

*[Signature]*  
30/19  
3

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA  
DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN  
DI SUMATERA UTARA**

*(prediksi dibuang)*

**SKRIPSI**

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Menperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**DESY RATNA SARI**  
NPM 1415100177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2018**

*Handwritten notes:*  
No. 1123  
Jepang 17/12/19

*Handwritten notes:*  
No. 1123  
Jepang 17/12/19



**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH  
PADA KOTA DAN KABUPATEN  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Dijadikan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

(Oleh:

**DESY RATNA SARI**  
NPM 1415100177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



Aeo Samudra - Proposal

*[Handwritten signature]*  
23/02  
1-2018

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA  
DAERAH PADA KOTA DAN  
KABUPATEN DI  
SUMATERA  
UTARA**

**PROPOSAL**

Digunakan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh

**DESY RATNA SARI**  
NPM 1415100177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2018**



Acc. Planning  
Proposal  
24/9/18

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP  
PREDIKSI BELANJA DAERAH PADA KOTA  
DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

**PROPOSAL**

Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

(oleh)

**DESY RATNA SARI**  
NPM 1415100177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2018**

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara, serta apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan kuantitatif asosiatif kausal. Data yang bersumber dari data sekunder yaitu dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2012 sampai 2016. Hasil dari penelitian ini, pertama menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara. Kedua, Terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pada 15 pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,7%.

Kata Kunci : DAU, PAD, Belanja Daerah dan *Flypaper Effect*

## ABSTRACT

---

*This study aims to determine whether the general allocation fund (DAU) and local revenue (PAD) partially and simultaneously have a significant effect on Regional Expenditures in Cities and Regencies in North Sumatra, and whether there is a Flypaper Effect in Cities and Regencies in North Sumatra. This study uses causal quantitative associative. Data sourced from secondary data is the Report on the Realization of Regional Expenditures Budget in 2012 to 2016. The results of this study, first indicate that the general allocation fund (DAU) and local revenue (PAD) are partially and simultaneously have a significant effect on Regional Expenditures in Cities and Regencies in North Sumatra. Secondly, there is a Flypaper Effect on 15 Regional Expenditures in North Sumatra City and Regency governments. The results of this statistical calculation mean that the ability of independent variables in explaining variations in changes in dependent variables is 96.7%.*

*Keywords : DAU, PAD, Regional Expenditure and Flypaper Effect*



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Dana Alokasi Umum.....	9
2. Pendapatan Asli Daerah .....	12
3. Belanja Daerah.....	21
4. <i>Flypaper Effect</i> .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Hipotesis .....	34
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
C. Definisi Operasional Variabel.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV</b> <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara.....	44
2. Deskripsi Variabel .....	45

3. Pengujian Asumsi Klasik.....	47
4. Regresi Linier Berganda .....	50
5. Uji Kesesuaian ( <i>Test Goodness Of Fit</i> ) .....	51
B. Pembahasan.....	54
1. Pengaruh DAU Secara Parsial Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara.....	54
2. Pengaruh PAD Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara.....	55
3. Pengaruh DAU dan PAD Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara.....	56
4. Analisis Uji $R^2$ .....	56
5. Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara .....	56
 BAB V	
SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Dana Alokasi Umum di Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2012 sampai 2016 .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Dana Alokasi Umum di Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2012 sampai 2016 .....	4
Tabel 1.3 Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2012 sampai 2016 .....	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	31
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian .....	35
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel .....	36
Tabel 3.3 Daftar Populasi dan Sampel.....	38
Tabel 4.1 Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara.....	45
Tabel 4.2 Perkembangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara .....	46
Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara .....	46
Tabel 4.2 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i> .....	49
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas .....	49
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	50
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda .....	51
Tabel 4.6 Uji Simultan .....	52
Tabel 4.7 Uji Parsial.....	52
Tabel 4.8 Uji Determinasi .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas .....	47
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas .....	48

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara”. Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Muhammad Yakub dan Ibunda Suryani serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluargaku yaitu Winda Devianti, Amd.Kom (Sepupu), Halimah (Adek), Hardiansyah (Adek), Waginem (Nenek), Wiki Sandra (Abang) terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada teman-temanku Nurma Wati, Rica Atria, Sri Pratiwi, Elia Siregar, Ria Widya dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Kepada teman-teman terdekatku di kampus yaitu Jerni Jurita Nababan, Odi Riski, Fitri May Sari, Irwansyah, Wangsit Efry Lia dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Januari 2020  
Penulis

Desy Ratna Sari  
1415100177

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik di tandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan otonomi daerah ini menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah. Pengelolaan yang cukup mendasar tersebut adalah mewajibkan pemerintahan daerah untuk menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri terkandung unsur “pendapatan dan belanja, dimana pendapatan yang dimaksud adalah sumber-sumber penerimaan dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan belanja yang dimaksud adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”. (Nordiawan, 2011). Selain itu pula, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor.

33 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk “mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang disebut dengan Dana Perimbangan yang mana salah satu diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU)”. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah, di samping sumber-sumber pendapatan yang lain. Menurut Santoso (2014), “untuk menutupi kebutuhan pengeluaran (*expenditure assignment*), DAU masih memegang peran utama. Peran PAD dalam APBD masih relatif kecil”.

Transfer atau yang disebut juga dengan *grants* dari pemerintahan pusat merupakan sumber dana utama pemerintahan daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintahan daerah dilaporkan dan diperhitungkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya agar terciptanya stabilitas terhadap aktivitas perekonomian di daerah (Iskandar, 2012). Anggaran pemerintah daerah merupakan cerminan dari kekuatan perekonomian yang tidak luput dari pengawasan masyarakatnya ataupun publik (Huddleston, 2015). Semakin besar transfer pemerintahan menunjukkan bahwa adanya ketergantungan pemerintah daerah yang lebih tinggi dalam memenuhi belanja daerahnya sendiri, dan semakin kecil transfer pemerintahan menunjukkan bahwa adanya ketergantungan pemerintah daerah akan lebih kecil dalam memenuhi belanja daerahnya pula (Kang, 2012).

Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN. Didalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah



dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang secara lengkap mengatur mengenai dana perimbangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Selain dana perimbangan, pemerintahan daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali pendanaan seperti belanja daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Didalam pelaksanaannya, salah satu fenomena yang paling mencolok dari otonomi daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat pada aspek keuangan. Alokasi transfer (*grants*) pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kurang memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaannya. Akibatnya, pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat, bukannya memaksimalkan kapasitas fiskal daerah (potensi fiskal) untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Ketergantungan ini akan menimbulkan rendahnya peran daerah itu sendiri dalam mendanai belanja daerah serta semakin dominannya

peran transfer/*grants* dari pusat, yaitu Dana Alokasi Umum. Fenomena tersebut di dalam banyak literatur disebut sebagai *Flypaper Effect* (Tampubolon, 2011).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Alokasi Umum di Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara**  
**Tahun 2012 sampai 2016**

No	Nama Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (Jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	628,975	733,672	795,351	795,351	891,150
2	Kab. Dairi	451,176	512,477	532,723	560,602	623,702
3	Kab. Deli Serdang	1,100,014	1,260,755	1,363,811	1,500,192	1,494,821
4	Kab. Langkat	847,503	982,658	1,039,651	1,039,651	1,200,481
5	Kab. Mandailing Natal	541,107	625,543	692,134	722,942	788,477
6	Kab. Simalungun	865,406	977,809	1,077,986	1,425,601	1,230,816
7	Kab. Tapanuli Selatan	454,322	517,343	572,098	592,764	654,669
8	Kab. Tapanuli Utara	487,346	1,104,926	596,841	616,216	650,827
9	Kab. Toba Samosir	387,623	423,292	495,377	506,844	537,941
10	Kota Medan	1,153,789	1,270,245	1,393,505	1,528,725	1,611,941
11	Kota Pematang Siantar	429,632	492,115	519,436	536,792	593,533
12	Kota Sibolga	292,873	338,507	371,813	380,075	412,806
13	Kota Tebing Tinggi	307,636	368,587	385,030	400,237	432,437
14	Kab. Humbang Hasundutan	376,847	440,920	486,880	511,805	533,185
15	Kab. Samosir	331,413	384,761	441,619	447,471	459,550
	<b>Total</b>	<b>8,655,661</b>	<b>10,433,611</b>	<b>10,764,255</b>	<b>11,565,268</b>	<b>12,116,336</b>

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa meningkatnya dana alokasi umum pada tahun 2012 sebesar 8.655.661 sampai tahun 2016 sebesar 12.116.336, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ketergantungan terhadap dana alokasi umum. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai pemerintah daerah tersebut, disebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih di dominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2012 sampai 2016**

No	Nama Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	37,895	53,692	91,468	98,279	52,170
2	Kab. Dairi	20,912	29,933	53,526	58,792	68,003
3	Kab. Deli Serdang	291,018	328,348	433,886	515,294	573,010
4	Kab. Langkat	129,243	65,521	107,812	122,715	132,673
5	Kab. Mandailing Natal	21,274	47,666	37,966	63,847	70,406
6	Kab. Simalungun	61,246	97,915	96,390	111,893	132,561
7	Kab. Tapanuli Selatan	56,418	69,220	95,588	109,349	76,641
8	Kab. Tapanuli Utara	34,023	75,909	63,696	82,754	94,783
9	Kab. Toba Samosir	16,543	19,803	26,014	30,953	54,391
10	Kota Medan	1,147,124	1,206,170	1,384,246	1,489,723	1,535,310
11	Kota Pematang Siantar	49,915	61,358	90,477	95,558	101,583
12	Kota Sibolga	26,698	29,458	52,923	60,487	68,538
13	Kota Tebing Tinggi	47,331	53,200	74,515	82,410	94,058
14	Kab. Humbang Hasundutan	17,902	17,633	29,491	35,238	42,097
15	Kab. Samosir	17,460	26,661	36,850	34,297	39,268
<b>Total</b>		<b>1,975,001</b>	<b>2,182,487</b>	<b>2,674,849</b>	<b>2,591,590</b>	<b>3,135,493</b>

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (2019)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa menurunnya pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 2.591.590 dari tahun sebelumnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi yang ada di suatu daerah.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Belanja Daerah di Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2012 sampai 2016**

No	Nama Pemerintah Daerah	Belanja Daerah (Jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	1,037,634	1,143,614	1,388,136	1,241,829	1,501,955
2	Kab. Dairi	593,188	694,247	745,529	864,134	993,346
3	Kab. Deli Serdang	1,801,287	2,005,506	2,361,728	3,260,500	3,005,435
4	Kab. Langkat	1,329,229	1,536,812	1,605,301	1,615,158	2,287,200
5	Kab. Mandailing Natal	765,110	850,556	972,739	1,144,944	1,495,777
6	Kab. Simalungun	1,378,043	1,432,131	1,648,279	2,109,777	2,185,035
7	Kab. Tapanuli Selatan	676,128	842,846	862,248	1,093,721	1,176,894
8	Kab. Tapanuli Utara	737,700	1,668,769	816,538	1,003,988	1,251,194
9	Kab. Toba Samosir	619,897	770,736	770,865	805,673	1,010,632
10	Kota Medan	3,021,172	3,224,449	3,723,643	4,878,166	4,525,231
11	Kota Pematang Siantar	639,607	741,073	774,366	1,007,049	940,141
12	Kota Sibolga	414,041	450,894	521,086	642,489	689,678
13	Kota Tebing Tinggi	479,585	584,572	614,015	651,371	760,703
14	Kab. Humbang Hasundutan	511,538	605,790	700,845	754,044	881,820
15	Kab. Samosir	400,831	506,372	552,483	660,281	810,390
<b>Total</b>		<b>14,404,989</b>	<b>17,058,369</b>	<b>18,057,802</b>	<b>21,733,122</b>	<b>23,515,432</b>

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (2019)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa meningkatnya belanja daerah pada tahun 2012 sebesar 14.404.989 sampai tahun 2016 sebesar 23.515.432, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja daerah.

Hal ini juga menunjukkan adanya ketergantungan antara dana alokasi umum dengan pendapatan asli daerah, dimana dana alokasi umum lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Besarnya total dana alokasi umum dan bagi hasil dibandingkan pendapatan asli daerah menunjukkan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara daerah masih belum mandiri dalam mengelola potensi yang ada di suatu daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya dana alokasi umum pada tahun 2012 sebesar 8.655.661 sampai tahun 2016 sebesar 12.116.336, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ketergantungan terhadap dana alokasi umum.
- b. Menurunnya pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar 2.591.590 dari tahun sebelumnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi yang ada di suatu daerah.

- c. Meningkatnya belanja daerah pada tahun 2012 sebesar 14.404.989 sampai tahun 2016 sebesar 23.515.432, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja daerah.

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat masalah yang akan dihadapi maka agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan hanya pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, pada tahun 2012 sampai 2016.

## **C. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara?
3. Apakah terjadi *Flypaper Effect* yang memiliki Belanja Daerah yang tertinggi dan terendah di pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper Effect* yang memiliki Belanja Daerah yang tertinggi dan terendah di pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD.
- c. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan maupun sebagai bahan referensi di dalam melakukan penelitian sejenis.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Apriliawati (2016), dengan judul Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Penelitian ini berjudul analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Jumlah Observasi/data (n): peneliti terdahulu menggunakan data pada tahun 2012 sampai 2014. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara dan data pada tahun 2012 sampai 2016.
2. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
3. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu pada Kabupaten/Kota Jawa Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Dana Alokasi Umum**

Menurut Nordiawan (2011 : 55), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Nordiawan (2011 : 56), “Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan ketentuan sebagai berikut” :

- a. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- b. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.



- c. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Penjelasan Undang-Undang Perimbangan).

Menurut Nordiawan (2011 : 56), “DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Formula penghitungan DAU adalah”:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitan Fiskal}$$

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Setiap kebutuhan pendanaan suatu daerah dihitung dengan pendekatan total pengeluaran rata-rata nasional dan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia, dengan asumsi bahwa Jumlah Penduduk adalah variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah, Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah, Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah, dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal tersebut diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari hasil pajak dan Sumber Daya Alam (Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 beserta penjelasannya).

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi. Menurut Nordiawan (2011 : 56), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{DAU Provinsi} = \text{Bobot Provinsi} \times \text{DAU Provinsi}$$

$$\text{Bobot Provinsi} = \text{Celah Fiskal Provinsi} / \Sigma \text{ Celah Fiskal Provinsi.}$$

Menurut Nordiawan (2011 : 57), “Sementara, DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Nordiawan (2011), “pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan suatu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pada Pendapatan asli daerah. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 No. 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

Menurut Nordiawan (2011 : 60), “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu:

**a. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pengelolaan pajak terbagi dua, yaitu pajak yang dikelola provinsi dan pajak yang dikelola kabupaten/kota, diantaranya adalah:

1) Pajak yang dikelola provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintahan.
- 2) Pajak yang dikelola kabupaten/kota
- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
  - g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
  - h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  - i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Peraturan Daerah Deli Serdang mengenai Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

#### **b. Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi terbagi atas:

##### 1) Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
  - d) Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - e) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - f) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - g) Retribusi Pelayanan Pasar
  - h) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - i) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - k) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - m) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - n) Retribusi Pelayanan Pendidikan
  - o) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan



- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan tersebut dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).

Penganggaran yang dihasilkan melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dimaksud adalah (a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan (b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Dalam Negeri nomor 37 tahun 2014).

#### **d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
- 6) Pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

- 7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 9) Pendapatan denda pajak
- 10) Pendapatan denda retribusi
- 11) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 12) Pendapatan dari pengembalian
- 13) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 14) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 15) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah meliputi (Pemendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang APBD untuk tahun 2015):

- 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen.
- 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan
- 3) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

### **3. Belanja Daerah**

Pengertian belanja sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 Paragraf 7 adalah “semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Belanja Daerah didefinisikan sebagai “kewajiban pemerintah daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Renyowijoyo, 2010 : 174)”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri APBD Nomor 37 Tahun 2014 Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Renyowijoyo (2010 : 175), “belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja dikelompokkan menjadi:

**a. Belanja Tidak Langsung**

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD.
- e) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN.

## 2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD.

## 3) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan

produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan

fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan
- c) Belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan.

#### 7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **b. Belanja Langsung**

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Penganggaran Belanja Langsung

Dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam



rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

## 2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

## 3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu
- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.

- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD.
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif.
- i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non-PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
- k) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif.
- l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.

#### 4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

#### 5) Surplus atau Defisit APBD

- a) Surplus atau Defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD.

#### **4. *Flypaper Effect***

Menurut Kuncoro (2012), “Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan utama implementasi transfer adalah untuk mengatasi masalah eksternalitas, mengoreksi ketidakseimbangan vertikal, pemerataan fiskal antardaerah (*horizontal equity*) dan mencapai tujuan pembangunan tertentu”. Namun, Pendapatan daerah merupakan syarat utama dalam mengupayakan belanja daerah (Pevcin, 2011). Menurut Kusumadewi (2013) menyatakan bahwa “beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*”.

*Flypaper effect* dapat terkendali dalam dua versi (Kuncoro, 2012) yaitu “Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintahan yang berlebihan, dan kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran

terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2010) diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya tinggi maupun pada daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya rendah”.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

**Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Apriliawati (2016)	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur.	$(X_1) = \text{PAD}$ $(X_1) = \text{DAU}$  $(Y) = \text{Belanja daerah}$	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 3) Telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2	Santoso (2014)	Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung	$(X_1) = \text{PAD}$ $(X_2) = \text{DBH}$ $(X_3) = \text{DAU}$  $(Y) = \text{Belanja daerah}$	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan PAD, DBH, dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) kab/kota di Provinsi Lampung ; secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung.

					sedangkan variabel DBH secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung. Nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, hal ini menunjukkan telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung.
3	Oktavia (2015)	<i>Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013.</i>	(X <sub>1</sub> ) = PAD (X <sub>2</sub> ) = DAU  (Y) = Belanja daerah	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD). Hasil pengujian untuk runtun waktu menunjukkan bahwa dengan data tahun 2003-2013 terjadi <i>flypaper effect</i> yang ditunjukkan dengan pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.
4	Widjajakoe soema (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri.	(X) = PAD (Y) = Belanja daerah	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD).
5	Suryatini (2017)	<i>The Influence Of Dau (General Allocation Fund) And Dak (Special Allocation Fund) On Capital Expenditure Of Bali Province.</i>	(X <sub>1</sub> ) = DAU (X <sub>2</sub> ) = DAK  (Y) = Belanja daerah	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD).
6	Panggabea (2014)	<i>Flypaper effect pada unconditional grant Dan pendapatan asli daerah terhadap Belanja daerah kabupaten/kota</i>	DAU (X <sub>1</sub> ), DBH (X <sub>2</sub> ) dan Pendapatan Asli Daerah (X <sub>3</sub> ).  Belanja daerah (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah

		Di Provinsi Sumatera Utara.			Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.
--	--	-----------------------------	--	--	--

Sumber : Diolah Penulis 2019

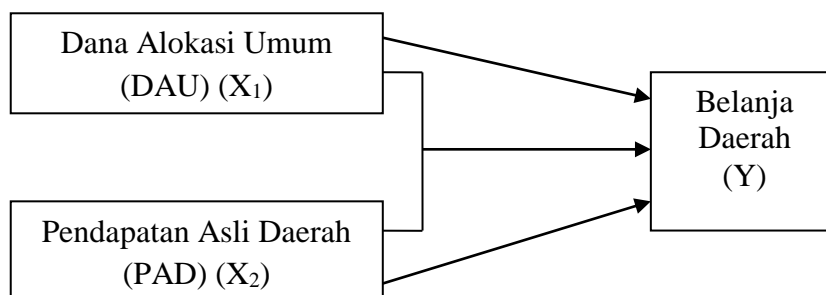
### C. Kerangka Konseptual

Dana Alokasi Umum menunjukkan jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka kemungkinan besar Dana Alokasi Umum ikut berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai pemerintah daerah tersebut, disebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih di dominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal, hal ini tidak jauh beda dari peran Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh dana yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula

kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung beban dan membiayai kewajiban belanja daerah.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis penelitian adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk di uji secara empiris. Proporsi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, dapat disangkal, atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena (Erlina, 2014:49). Berdasarkan perumusan masalah dalam kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.
2. Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.
3. Terjadi *Flypaper Effect* yang memiliki Belanja Daerah yang tertinggi dan terendah di pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuantitatif asosiatif kausal. Asosiatif kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel DAU dan PAD dengan variabel belanja daerah dimana variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, maka dapat dinyatakan bahwa variabel DAU dan PAD menyebabkan variabel belanja daerah (Erlina, 2014).

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara melalui website [djk.depkeu.go.id](http://djk.depkeu.go.id).

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019, dengan format berikut:

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

No	Aktivitas	Tahun 2019									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okto
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■	■								
2	Penyusunan Proposal			■	■	■					
3	Seminar Proposal						■				
4	Perbaikan Acc Proposal							■	■		
5	Pengolahan Data							■	■	■	
6	Penyusunan Skripsi									■	
7	Bimbingan Skripsi									■	
8	Sidang meja hijau										■

Sumber : Diolah Penulis, 2019

## C. Definisi Operasional Variabel

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama dana alokasi umum ( $X_1$ ), variabel bebas kedua pendapatan asli daerah ( $X_2$ ), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu belanja daerah ( $Y$ ).

### 2. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah agar dalam penelitian ini dijabarkan secara jelas definisi dari variabel independen dalam penelitian ini dan menguji pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1	Dana Alokasi Umum ( $X_1$ )	Kebutuhan Daerah – Potensi Penerimaan Daerah (Nordiawan, 2011 : 55)	Dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Nordiawan, 2011 : 55).	Rasio
2	Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ )	Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan + Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Nordiawan, 2011 : 60)	Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Nordiawan, 2011 : 60)	Rasio
3	Belanja Daerah ( $Y$ )	Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan (Renyowijoyo, 2010 : 174)	Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Renyowijoyo, 2010 : 174).	Rasio

Sumber: Penulis (2019)

## **D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek maupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Erlina, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara, dengan menggunakan data Realisasi DAU dan PAD sebagai variabel independen (variabel X), dan Realisasi Belanja Daerah sebagai variabel dependen (variabel Y), dengan data sekunder berbentuk *time series* dari tahun 2012-2016 sebanyak 33 Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara meliputi 25 kabupaten dan 8 kota.

### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Erlina, 2014). Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:

- a. Pemerintah Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara yang telah menyerahkan dan mempublikasikan LKPD yang sudah diaudit oleh BPK dari tahun 2012-2016.
- b. Belanja daerah tertinggi dan terendah Pemerintah Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara dari tahun 2012-2016.

Sehingga banyak unit pengamatan analisis adalah ( $5 \times 15 = 75$  data) Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

**Tabel 3.3 Daftar Populasi dan Sampel**

No	Nama Pemerintah Daerah	Kriteria 1	Kriteria 2	Sampel
1	Kab. Asahan	√	√	Sampel 1
2	Kab. Dairi	√	√	Sampel 2
3	Kab. Deli Serdang	√	√	Sampel 3
4	Kab. Tanah Karo	√	X	Tidak
5	Kab. Labuhan Batu	√	X	Tidak
6	Kab. Langkat	√	√	Sampel 4
7	Kab. Mandailing Natal	√	√	Sampel 5
8	Kab. Nias	√	X	Tidak
9	Kab. Simalungun	√	√	Sampel 6
10	Kab. Tapanuli Selatan	√	√	Sampel 7
11	Kab. Tapanuli Tengah	√	X	Tidak
12	Kab. Tapanuli Utara	√	√	Sampel 8
13	Kab. Toba Samosir	√	√	Sampel 9
14	Kota Binjai	√	X	Tidak
15	Kota Medan	√	√	Sampel 10
16	Kota Pematang Siantar	√	√	Sampel 11
17	Kota Sibolga	√	√	Sampel 12
18	Kota Tanjung Balai	√	X	Tidak
19	Kota Tebing Tinggi	√	√	Sampel 13
20	Kota Padang Sidempuan	√	X	Tidak
21	Kab. Pakpak Barat	√	X	Tidak
22	Kab. Nias Selatan	√	X	Tidak
23	Kab. Humbang Hasundutan	√	√	Sampel 14
24	Kab. Serdang Bedagai	√	X	Tidak
25	Kab. Samosir	√	√	Sampel 15
26	Kab. Batu Bara	√	X	Tidak
27	Kab. Padang Lawas	√	X	Tidak
28	Kab. Padang Lawas Utara	√	X	Tidak
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	√	X	Tidak
30	Kab. Labuhanbatu Utara	√	X	Tidak
31	Kab. Nias Utara	√	X	Tidak
32	Kab. Nias Barat	√	X	Tidak
33	Kota Gunung Sitoli	√	X	Tidak

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (2019)

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain.

#### **4. Sumber Data**

Data yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LKPD) laporan kinerja pemerintah daerah yang sudah diaudit BPK pada tahun 2012 sampai 2016 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet situs Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia yaitu [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Pengumpulan data sekunder yang relevan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang diambil berupa Dana Alokasi Umum, realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dari Pemerintahan Daerah di Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara yang diperoleh dari internet melalui website [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) yang berupa data series.

#### **F. Teknik Analisis Data**

##### **1. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak biasa jika telah memenuhi persyaratan yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi

koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap biasa dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan.

#### **a. Uji Normalitas**

Menurut Erlina (2014), “Uji Normalitas data berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametrik dan jika data tidak normal gunakan statistik non parametrik atau lakukan *treatment* agar data normal. Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil”.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Menurut Erlina (2014), “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikoloniearitas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila variabel-variabel bebas saling berkorelasi yang dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10”.

### c. Uji Autokorelasi

Menurut Erlina (2014), “Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periodet dengan kesalahan pengganggu pada periodet-1. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- 1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memiliki asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik normalitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang berbunyi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh terhadap Belanja Daerah adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

$Y$  = Belanja Daerah (*Dependent Variabel*)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

$X_1$  = Dana Alokasi Umum (*Independent Variabel*)

$X_2$  = Pendapatan Asli Daerah (*Independent Variabel*)

$\epsilon$  = Error term

#### **b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Menurut Kuncoro (2012), “Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Analisis korelasi parsial (*Partial Correlation*) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Nilai korelasi ( $r$ ) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio”. Hipotesis statistik yang diajukan adalah:

$H_0: b_1, b_2 = 0$ , artinya suatu variabel independen secara parsial

Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak



### c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Kuncoro (2012), “Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam metode mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, maksudnya apakah suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen”. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

- 1)  $H_0 : b_1, b_2, = 0$ , artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2)  $H_a: b_1, b_2, \neq 0$ , artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah :

- a) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- b) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

### d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Kuncoro (2012), “Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Apabila nilai  $R^2$  semakin kecil mendekati nol, berarti variabel-variabel independen hampir tidak memberikan semua informasi”.

### e. Pendeteksi *Flypaper Effect*

Menurut Kuncoro (2012), “Apabila nilai koefisien dana alokasi umum lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD), menunjukkan terjadinya *flypaper effect*”.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian,

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketentuan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

## 2. Deskripsi Variabel

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian belanja daerah (BD), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU).

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara**

No	Pemerintahan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	1,037,634	1,143,614	1,388,136	1,241,829	1,501,955
2	Kab. Dairi	593,188	694,247	745,529	864,134	993,346
3	Kab. Deli Serdang	1,801,287	2,005,506	2,361,728	3,260,500	3,005,435
4	Kab. Langkat	1,329,229	1,536,812	1,605,301	1,615,158	2,287,200
5	Kab. Mandailing Natal	765,110	850,556	972,739	1,144,944	1,495,777
6	Kab. Simalungun	1,378,043	1,432,131	1,648,279	2,109,777	2,185,035
7	Kab. Tapanuli Selatan	676,128	842,846	862,248	1,093,721	1,176,894
8	Kab. Tapanuli Utara	737,700	1,668,769	816,538	1,003,988	1,251,194
9	Kab. Toba Samosir	619,897	770,736	770,865	805,673	1,010,632
10	Kota Medan	3,021,172	3,224,449	3,723,643	<b>4,878,166</b>	4,525,231
11	Kota Pematang Siantar	639,607	741,073	774,366	1,007,049	940,141
12	Kota Sibolga	<b>414,041</b>	450,894	521,086	642,489	689,678
13	Kota Tebing Tinggi	479,585	584,572	614,015	651,371	760,703
14	Kab. Humbang Hasundutan	511,538	605,790	700,845	754,044	881,820
15	Kab. Samosir	400,831	506,372	552,483	660,281	810,390

Pada tabel 4.1 di atas diketahui dari variabel belanja daerah nilai minimum pada Kota Sibolga tahun 2014 sebesar 479,585 juta dan nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2017 sebesar 4,878,166 juta.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara**

No	Pemerintahan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	628,975	733,672	795,351	795,351	891,150
2	Kab. Dairi	451,176	512,477	532,723	560,602	623,702
3	Kab. Deli Serdang	1,100,014	1,260,755	1,363,811	1,500,192	1,494,821
4	Kab. Langkat	847,503	982,658	1,039,651	1,039,651	1,200,481
5	Kab. Mandailing Natal	541,107	625,543	692,134	722,942	788,477
6	Kab. Simalungun	865,406	977,809	1,077,986	1,425,601	1,230,816
7	Kab. Tapanuli Selatan	454,322	517,343	572,098	592,764	654,669
8	Kab. Tapanuli Utara	487,346	1,104,926	596,841	616,216	650,827
9	Kab. Toba Samosir	387,623	423,292	495,377	506,844	537,941
10	Kota Medan	1,153,789	1,270,245	1,393,505	1,528,725	<b>1,611,941</b>
11	Kota Pematang Siantar	429,632	492,115	519,436	536,792	593,533
12	Kota Sibolga	<b>292,873</b>	338,507	371,813	380,075	412,806
13	Kota Tebing Tinggi	307,636	368,587	385,030	400,237	432,437
14	Kab. Humbang Hasundutan	376,847	440,920	486,880	511,805	533,185
15	Kab. Samosir	331,413	384,761	441,619	447,471	459,550

Pada tabel 4.2 di atas diketahui dari variabel dana alokasi umum nilai minimum pada Kota Sibolga tahun 2014 sebesar 292,873 juta dan nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2018 sebesar 1,611,941 juta.

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara**

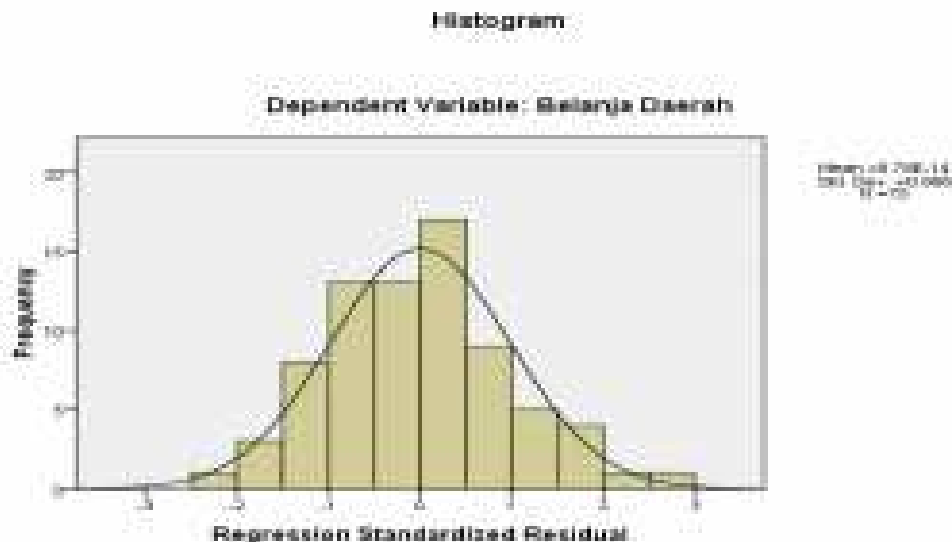
No	Pemerintahan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	37,895	53,692	91,468	98,279	52,170
2	Kab. Dairi	20,912	29,933	53,526	58,792	68,003
3	Kab. Deli Serdang	291,018	328,348	433,886	515,294	573,010
4	Kab. Langkat	129,243	65,521	107,812	122,715	132,673
5	Kab. Mandailing Natal	21,274	47,666	37,966	63,847	70,406
6	Kab. Simalungun	61,246	97,915	96,390	111,893	132,561
7	Kab. Tapanuli Selatan	56,418	69,220	95,588	109,349	76,641
8	Kab. Tapanuli Utara	34,023	75,909	63,696	82,754	94,783
9	Kab. Toba Samosir	16,543	19,803	26,014	30,953	54,391
10	Kota Medan	1,147,124	1,206,170	1,384,246	1,489,723	<b>1,535,310</b>
11	Kota Pematang Siantar	49,915	61,358	90,477	95,558	101,583
12	Kota Sibolga	<b>26,698</b>	29,458	52,923	60,487	68,538
13	Kota Tebing Tinggi	47,331	53,200	74,515	82,410	94,058
14	Kab. Humbang Hasundutan	17,902	17,633	29,491	35,238	42,097
15	Kab. Samosir	17,460	26,661	36,850	34,297	39,268

Pada tabel 4.3 di atas diketahui dari variabel pendapatan asli daerah nilai minimum pada Kota Sibolga tahun 2014 sebesar 26,698 juta dan nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2018 sebesar 1,535,310 juta.

### 3. Pengujian Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas data

Uji Normalitas data berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametrik dan jika data tidak normal gunakan statistik non parametrik atau lakukan *treatment* agar data normal. Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Erlina, 2008). Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:



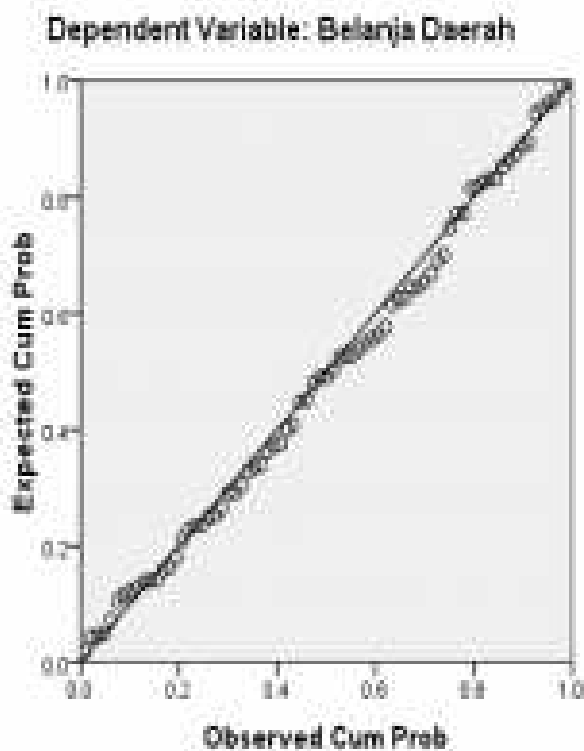
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

**Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola

distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel kecil.

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

**Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar *PP Plot* terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik”.

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

**Tabel 4.4**  
**Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test***  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10423971
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.432
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		<b>.992</b>

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,992. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.527	.442		-1.191	.238		
	DAU	.943	.044	.739	21.367	.000	.372	2.686
	PAD	.158	.019	.289	8.367	.000	.372	2.686

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $VIF < 10$  dan *Tolerance*  $> 0,10$ . Untuk variabel DAU memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,372 dan VIF sebesar 2,686. Variabel PAD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,372 dan VIF sebesar 2,686.

#### c. Uji Autokorelasi

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Terbebas dari autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji *run test* lebih besar  $>$  dari 0,05.

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00238
Cases < Test Value	37
Cases $\geq$ Test Value	38
Total Cases	75
Number of Runs	35
Z	-.812
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>	<b>.417</b>

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,417  $>$  dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

#### 4. Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.



**Tabel 4.7**  
**Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	<b>(Constant)</b>	<b>-.527</b>	.442		-1.191	.238		
	<b>DAU</b>	.943	.044		<b>.739</b>	21.367	.000	.372 2.686
	<b>PAD</b>	.158	.019		<b>.289</b>	8.367	.000	.372 2.686

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Tabel 4.7 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,527 + 0,739 X_1 + 0,289 X_2$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai belanja daerah (Y) adalah sebesar -0,527 juta.
- b. Jika terjadi peningkatan DAU sebesar 1 juta, maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,739 juta.
- c. Jika terjadi peningkatan PAD sebesar 1 juta, maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,289 juta.

## 5. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

### a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

“Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat”.

**Tabel 4.8**  
**Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.289	2	12.145	<b>10.087</b>	<b>.000<sup>a</sup></b>
	Residual	.804	72	.011		
	Total	25.093	74			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah  $10,087 > F_{tabel} 3,12$ , dengan signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu DAU ( $X_1$ ) dan PAD ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

#### b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen,”.

**Tabel 4.9**  
**Uji Parsial**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.527	.442		-1.191	.238		
	<b>DAU</b>	.943	.044	.739	<b>21.367</b>	<b>.000</b>	.372	2.686
	<b>PAD</b>	.158	.019	.289	<b>8.367</b>	<b>.000</b>	.372	2.686

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji statistik t di atas, terbukti bahwa variabel DAU ( $X_1$ ) dan PAD ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing variabel:

- 1) Kemandirian DAU ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel DAU ( $X_1$ ) diketahui bahwa  $t_{hitung}$  21,367 >  $t_{tabel}$  1,993 dan nilai signifikansi variabel DAU ( $X_1$ ) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai DAU ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

- 2) PAD ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel PAD ( $X_2$ ) diketahui bahwa  $t_{hitung}$  8,367 <  $t_{tabel}$  1,993 dan nilai signifikansi variabel PAD ( $X_2$ ) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai PAD ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 <sup>a</sup>	.968	.967	.10568

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.10 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,967. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,7%, sedangkan sisanya sebesar 3,3% (100% - 96,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,967 yang artinya 96,7% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti silpa, dana alokasi khusus dan lain-lain.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaruh DAU Secara Parsial Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa DAU terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena *unconditional grants* merupakan bentuk transfer yang paling penting selain dana alokasi khusus. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dana transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Daerah pada Kota Dan Kabupaten di

Sumatera Utara masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayah Hurul (2014), yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Panggabean (2014), dimana DAU terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

## **2. Pengaruh PAD Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD yang merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah didasarkan pada potensi daerah dan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Sehingga semakin besar realisasi pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran belanja daerah untuk tahun selanjutnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayah Hurul (2014), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini

juga mendukung penelitian dari Panggabean (2014), dimana PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### **3. Pengaruh DAU dan PAD Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa DAU dan PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dimana  $F_{hitung}$  adalah  $10,087 > F_{tabel}$  3,12, dengan signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayah Hurul (2014), yang menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Panggabean (2014), dimana DAU dan PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### **4. Analisis Uji Koefisien Determinasi( $R^2$ )**

Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,967. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,7%, sedangkan sisanya sebesar 3,3% (100% - 96,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,967 yang artinya 96,7% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti silpa, dana alokasi khusus dan lain-lain.

## **5. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terbukti terjadinya *Flypaper Effect* pada belanja daerah, dimana DAU lebih besar dibandingkan PAD. Hal ini disebabkan bahwa *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (DAU) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Hal ini tentu sesuai asas desentralisasi dan prinsip otonomi di mana pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Hasil studi penelitian yang dilakukan di Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara, ditemukan fakta bahwa kapasitas fiskal daerah tidak memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap belanja daerah daripada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah, pemerintahan daerah di Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara belum mandiri dari segi keuangan karena belum mampu bertumpu pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. DAU bisa disebut dengan bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun

pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Junaidi (2012:47) secara empiris membuktikan bahwa belanja pemerintah daerah di Indonesia terlalu responsif atas kenaikan DAU, dibandingkan kenaikan PAD terutama dari pajak daerah. Pemerintah daerah selaku penerima DAU bereaksi secara asimetri atas peningkatan nilai DAU yang diterima. Bila DAU meningkat dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU.

Dana Alokasi Umum menunjukkan jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka kemungkinan besar Dana Alokasi Umum ikut berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai pemerintah daerah tersebut, disebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih di dominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal, hal ini tidak jauh beda dari peran Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh dana yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung beban dan membiayai kewajiban belanja daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi



peningkatan pula pada jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan. Dengan kata lain jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Panggabean (2014), dimana terjadi *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang *flypaper effect* pada DAU dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.
2. Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.
3. Terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pada pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara, seperti 18 Kota Dan Kabupaten di Sumatera Utara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan efektif dan efisien sehingga cita-cita serta harapan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat yang disertai

pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak jumlah sampel, khususnya di luar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini bertujuan agar semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah mandiri maupun yang belum mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2018). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Modal Intelektual Pada Laporan Tahunan Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 23-34.
- Apriliawati, Kiki Ninda. (2016). Pengaruh Pad dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016. ISSN : 2460-0585.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Aspan, H., I. M. Sipayung, A. P. Muharrami, and H. M. Ritonga. (2017). "The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)". *International Journal of Global Sustainability*, ISSN 1937-7924, Vol. 1, No. 1, pp. 55-66.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Erlina, (2014). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Kedua, Usu Press, Medan.
- Huddleston, Jack R.(2015). "An Introduction To Local Government Budgets". University of Wisconsin-MadisonUSA.<https://www.lincolnst.edu/subcenters/teaching-fiscal-dimensions-of-planning/materials/huddleston-guide.pdf>
- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant "Melayu" in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.
- Iskandar, Irham, (2012). "*Flypaper Effect* Pada *Unconditional Grant*", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung*. Volume 13, Nomor 1, Juni 2012: 113-131.
- Kang, Younguck And Dhani Setyawan. (2012). *Intergovernmental Transfer And The Flypaper Effect: Evidence From Municipalities/Regencies In Indonesia*. Kdi School. Working Paper.
- Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. (2013). "*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia". *Jaai*, Vol. 11 No. 1.

- Kuncoro, Haryo. (2012). "Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia". Sna X. Unhas Makassar. <https://Smartaccounting.Files.Wordpress.Com/2011/03/Aspp08.Pdf>.
- Lestario, F. (2018). Dampak Pertumbuhan Bisnis Franchise Waralaba Minimarket Terhadap Perkembangan Kedai Tradisional Di Kota Binjai. *Jumant*, 7(1), 29-36.
- Maimunah, Mutiara. (2010). "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera", Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Nordiawan, Deddi. (2011). Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat.
- Oktavia, Deni. (2015). *Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013*.
- Panggabean, Fitri Yani. (2014). *Flypaper effect pada unconditional grant Dan pendapatan asli daerah terhadap Belanja daerah kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Pane, D. N. (2018). Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian Teh Botol Sosro (Studi Kasus Konsumen Alfamart Cabang Ayahanda). *Jumant*, 9(1), 13-25.
- Pramono, C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.
- Pevcin, Primož. 2011. "Flypaper Effect In Slovenian Municipal Finances". University Of Slovenia.
- Renyowijoyo, Muindro, (2010). Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba, Edisi 2, Mitra Wacana Media.
- Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).
- Santoso, Imam. (2014). Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung

- Syauqi, T. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor dengan Pengalaman Kerja Auditor sebagai Variabel Moderating pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Medan.
- Setiawan, A. (2018). Pengaruh Promosi Jabatan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Pegawai Di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 191-203.
- Suryantini, Ni Putu Santi. (2017). *The Influence Of Dau (General Allocation Fund) And Dak (Special Allocation Fund) On Capital Expenditure Of Bali Province*.
- Tampubolon, Leonard P, (2011), "Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau", Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 10.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wakhyuni, E. (2018). Kemampuan Masyarakat Dan Budaya Asing Dalam Mempertahankan Budaya Lokal Di Kecamatan Datuk Bandar. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 25-31.
- Waruwu, A. A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *JUMANT*, 10(2), 1-14.
- Widjajakoesoema, Ang Sandera. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri.